



---

## **PANCASILA DALAM PERSEPTIF MULTIKULTURALISME: MENJAGA KESATUAN DAN KERAGAMAN**

**Irgi Iqbal**

*irgiiqbal890@gmail.com*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Zainarti**

*zainarti@uinsu.com*

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, Sumatera Utara, 20371.

*\*korespondensi email: irgiiqbal890@gmail.com*

**ABSTRACT** *Pancasila as the basic ideology of the Indonesian state has an important role in maintaining unity and diversity in a multicultural society. This article discusses how Pancasila functions as a foundation for values that support national unity and tolerance between ethnic and cultural groups. In the context of multiculturalism, Pancasila is not only a unifying tool but also a guideline in resolving conflicts and creating social harmony. By analyzing the application of Pancasila principles in various social and educational policies, as well as case studies from various regions in Indonesia, this article aims to identify challenges and strategies in integrating Pancasila values with the principles of multiculturalism. The research results show that despite various challenges in its implementation, Pancasila remains effective in facilitating intercultural dialogue and strengthening inclusive national identity.*

**Keywords:** *Pancasila, Multiculturalism Perspective, Unity, Diversity*

**ABSTRAK** Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan keragaman di tengah masyarakat yang multikultural. Artikel ini membahas bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan nilai-nilai yang mendukung persatuan bangsa dan toleransi antar kelompok etnis dan budaya. Dalam konteks multikulturalisme, Pancasila tidak hanya menjadi alat pemersatu tetapi juga sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan harmoni sosial. Dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai kebijakan sosial dan pendidikan, serta studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip multikulturalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, Pancasila tetap efektif dalam memfasilitasi dialog antar budaya dan memperkuat identitas nasional yang inklusif.

**Kata kunci:** Pancasila, Perspektif Multikulturalisme, Kesatuan, Keragaman

### **PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia tidak dapat mengabaikan atau menghindari dari multikulturalisme bangsa ini; terdapat ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa, dan agama di Indonesia. Jika kita dapat mengelola integrasi ini dengan cara yang menciptakan keindahan dan kekuatan, kondisi ini dapat menjadi berkah dan keputusan yang bijaksana. Namun, jika multikulturalisme tidak diakomodasi secara efektif, hal itu juga dapat menjadi tragedi yang berujung pada kehancuran negara. Karena Republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan kaya, masuk akal jika tujuan pendiriannya

adalah untuk menciptakan negara bangsa “yang demokratis dan yang berupaya menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan.”

Mengingat negara Indonesia didirikan oleh merasa bahwa kemajemukan bangsa ini hanya dapat memiliki makna yang baik melalui negara bangsa, demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan (HAM), yang kemudian dipadukan dengan pengetahuan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti dalam petikan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 berikut: “Negara Indonesia bukanlah negara untuk satu orang, dan bukan pula negara untuk satu golongan, sekalipun golongan kaya.” Namun, kita telah mendirikan negara yang “setiap orang untuk dirinya sendiri, tidak ada yang tertinggal” (Shofa, 2016).

Kelompok sosial tertentu di Indonesia masih beroperasi dengan anggapan bahwa perbedaan merupakan ancaman yang perlu disingkirkan dan bahwa mereka adalah musuh yang harus ditaklukkan. Keberagaman suku, agama, peradaban, suku bangsa, dan faktor-faktor lain yang tampak berlebihan di antara kelompok-kelompok bukanlah suatu bahaya, juga tidak ada kemungkinan terjadinya kekerasan yang berujung pada kehancuran negara. Namun pada kenyataannya, masyarakat Indonesia sedang berintegrasi di sepanjang perpecahan ini. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat yang sangat beragam dapat mendorong kecenderungan alami masyarakat menuju integrasi penuh. Sama sekali tidak ada rasa takut akan disintegrasi negara Indonesia karena sejarah menunjukkan bahwa negara ini dibangun di atas kesenjangan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ketika orang tidak mampu mengelola secara efektif variasi dalam keragaman dan multikulturalisme, disintegrasi suatu bangsa pun terjadi. Lebih jauh, perlu untuk membantah anggapan bahwa ada kelompok superior dan inferior, serta kelompok mayoritas dan minoritas. Untuk itu, seseorang harus memahami dan terbuka untuk menghargai multikulturalisme.

Ada keragaman dalam masyarakat dan budaya Indonesia sehingga partai-partai inferior dan minoritas diperlukan agar partai mayoritas, atau partai superior, dapat terus ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika dikombinasikan dengan konten politik atau ideologis atau kemungkinan yang tidak setara untuk kinerja ekonomi, dikotomi multikultural mayoritas-minoritas, superior-inferior dapat menjadi tragedi besar (Kusumohamidjojo, 2000). Oleh karena itu, pemahaman yang lengkap tentang kesatuan dalam keragaman diperlukan untuk pengembangan masyarakat Indonesia yang beragam.

Konsep ini berpusat pada pelestarian persatuan Indonesia sambil mengakui kekayaan lanskap sosial dan budayanya yang beragam.

Pada kenyataannya, keragaman masyarakat dan budaya Indonesia bukanlah masalah baru. Franz Magnis-Suseno (2010) mengklaim bahwa sejak negara ini didirikan sebagai negara otonom, Ada keragaman dalam masyarakat dan budaya Indonesia sehingga partai-partai inferior dan minoritas diperlukan agar partai mayoritas, atau partai superior, dapat terus ada, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bila dipadukan dengan muatan politik atau ideologi atau kemungkinan yang tidak setara bagi kinerja ekonomi, dikotomi multikultural mayoritas-minoritas, superior-inferior dapat menjadi tragedi besar (Kusumohamidjojo, 2000). Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang kesatuan dalam keberagaman diperlukan untuk pengembangan masyarakat Indonesia yang beragam. Konsep ini berpusat pada upaya menjaga persatuan Indonesia sambil mengakui kekayaan bentang sosial dan budayanya yang beragam. Kenyataannya, keberagaman masyarakat dan budaya Indonesia bukanlah isu baru. Franz Magnis-Suseno (2010) mengklaim bahwa sejak negara ini berdiri sebagai negara otonom.

Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang sangat kaya. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara berperan krusial dalam memelihara kesatuan dan keragaman. Sejak diresmikan sebagai dasar negara pada tahun 1945, Pancasila telah diakui sebagai pedoman moral dan ideologis yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan untuk menjembatani perbedaan dan mempersatukan berbagai kelompok dalam satu kesatuan yang harmonis.

Namun, dalam era globalisasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila semakin besar. Fenomena multikulturalisme, yang mengedepankan keberagaman budaya dan identitas kelompok, seringkali menghadapi potensi konflik dan pergeseran nilai-nilai. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam mendukung multikulturalisme dan menjaga kesatuan bangsa.

Untuk memastikan bahwa mantra-mantra yang menggambarkan keberagaman sebagai berkah dan bukan beban tidak meninabobokan dan membebani masyarakat Indonesia, topik keberagaman perlu dikaji secara menyeluruh. Banyak orang Indonesia yang rasional memahami hal ini dan menyadari besarnya masalah yang dihadapi negara-

bangsa ini di masa mendatang. Pembahasan tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia berada dalam kerangka ini, yang membuat multikulturalisme relevan. Lebih tepatnya, bangsa Indonesia yang multikultural tidak diragukan lagi harus dilihat melalui lensa multikulturalisme. Seperti yang dikatakan Franz Magnis-Suseno (2005), Indonesia hanya dapat bersatu jika keberagaman yang merupakan realitas sosial dihormati. Meskipun demikian, menjaga persatuan Indonesia tidak seharusnya menghilangkan identitas masing-masing negara, tetapi tujuannya adalah agar setiap orang menjadi warga negara Indonesia tanpa mengalami keterasingan. Kemakmuran Indonesia di masa depan bergantung pada pola pikir yang menghargai identitas masing-masing dan siap menahan diri untuk tidak memaksakan keyakinan sendiri kepada orang lain. Hal ini menuntut transformasi pengetahuan multikulturalisme menjadi identitas nasional dan integrasi nasional, serta menjadikan agama sebagai landasan kohesi nasional (Shofa, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme dalam konteks sosial dan pendidikan. Dengan memahami peran Pancasila dalam membangun harmoni antar kelompok yang berbeda, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul serta memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional yang inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi penerapan Pancasila dalam konteks multikulturalisme. Metode yang diterapkan mencakup studi literatur. Proses pengumpulan informasi dan pemaparan pokok bahasan untuk penulisan artikel ini disebut studi pustaka. Studi pustaka melibatkan pembacaan dan penelaahan berbagai buku serta publikasi ilmiah terkemuka yang relevan dengan bidang studi. Hal ini memungkinkan dilakukannya analisis untuk memperoleh pandangan atau opini penulis. Penulisan artikel ini melibatkan pembahasan tentang Pancasila, multikulturalisme, penerapan nilai-nilai Pancasila dan cara melakukannya, serta kesulitan dan dampak keberagaman di Indonesia. Tujuan penggunaan metode studi pustaka ini adalah untuk mengumpulkan informasi teoritis yang akan membantu penulisan artikel. Temuan dari tinjauan pustaka, menurut Faisal (1992:30), dapat digunakan untuk menjelaskan isu-isu yang akan diteliti.

Analisis mendalam terhadap literatur yang relevan mengenai Pancasila, multikulturalisme, dan implementasinya dalam konteks sosial dan pendidikan. Sumber-sumber yang dikaji meliputi buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan penelitian sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menilai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam praktik dan kebijakan. Data yang dikumpulkan dari metode ini akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang berkaitan dengan peran Pancasila dalam mendukung multikulturalisme dan menjaga kesatuan bangsa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberagaman di Indonesia merupakan salah satu kekayaan terbesar bangsa ini. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mengintegrasikan berbagai bentuk keberagaman tersebut sebagai bagian dari kekayaan nasional. Indonesia, dengan banyaknya etnis yang hidup berdampingan sambil mempertahankan kebudayaan dan tradisi masing-masing, menjadi salah satu negara multikultural terbesar di dunia (Hanifi, 2016: 83). Pancasila merupakan prinsip yang mampu menyatukan seluruh komponen bangsa dan mencerminkan keragaman yang ada (Risladiba, 2018).

Indonesia adalah negara yang kompleks dari berbagai dimensi, terutama dari segi keberagaman etnis atau suku bangsa. Menurut data Direktorat Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat sekitar 525 kelompok etnik di Indonesia, dengan banyak kelompok etnik yang biasanya mendiami pulau-pulau tertentu, sehingga pulau-pulau tersebut sering diidentifikasi dengan kelompok etnik tertentu (Bahar, 1997).

Multikulturalisme di Indonesia memiliki karakteristik unik yang berkembang berdasarkan semangat nasionalisme. Multikulturalisme Indonesia mengakui keberagaman budaya dari berbagai suku bangsa sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Keberagaman ini tidak dimaksudkan untuk memisahkan, melainkan untuk memperkuat kesatuan. Oleh karena itu, budaya dari masing-masing suku bangsa harus dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Proses ini melalui komunikasi dan dialog menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Menurut Magnis Suseno (2005: 216), sebagai bangsa multikultural, Indonesia harus dilihat melalui perspektif multikulturalisme untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Negara ini dapat menjadi utuh jika keberagaman dihargai dan dihormati. Upaya

menjaga persatuan tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas setiap kelompok, melainkan untuk mengedepankan toleransi dan saling menghargai tanpa diskriminasi. Toleransi, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak merupakan kunci tercapainya multikulturalisme yang ideal.

Globalisasi membawa perubahan sosial melalui kemudahan interaksi antar masyarakat di berbagai belahan dunia, yang dapat menyebabkan transkulturasi. Dalam menghadapi globalisasi, Indonesia perlu menjaga integritas dan ketahanan nasional dengan fleksibilitas budaya dan adaptasi terhadap budaya luar yang positif. Meskipun penting untuk memfilter budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sikap apriori terhadap budaya luar harus dihindari. Semua langkah ini harus dilakukan dengan bijaksana.

Di era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan politik, tantangan semakin kompleks, termasuk keberagaman dalam etnis, ras, agama, gender, dan budaya. Tantangan ini dapat diatasi dengan mengembangkan multikulturalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kymlicka (2004: 43) menekankan pentingnya multikulturalisme yang cair dalam kelompoknya, memberikan kebebasan berafiliasi, dan memiliki konsepsi identitas kelompok yang non-eksklusif.

Multikulturalisme di Indonesia seharusnya mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, harus menjadi dasar dalam menerima pluralitas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Multikulturalisme dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, namun juga berpotensi menyebabkan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Sifat egosentrisme yang mengatasnamakan agama atau suku dapat menimbulkan eksklusivisme dan konflik. Menjadikan multikulturalisme sebagai kekuatan Indonesia adalah tantangan yang memerlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menghindari dampak negatif.

Budimansyah (2008) menjelaskan bahwa untuk membentuk masyarakat multikultural yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya sistematis, terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pendidikan multikultural dalam konteks formal maupun informal sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Konflik antar suku

bangsa sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya penghargaan antar suku bangsa perlu dilakukan. Pendidikan berperan dalam mengubah pandangan egosentrisme menjadi sikap yang lebih harmonis dalam masyarakat multikultural.

Masyarakat yang hidup dalam keberagaman tidak selalu bebas dari kemungkinan konflik. Pengalaman lama dalam multikulturalisme tidak cukup untuk memastikan pemahaman dan rasa bangga terhadap perbedaan. Menurut Azyumardi Azra (Budimansyah dan Suryadi, 2008: 31), membangun masyarakat multikultural yang sehat memerlukan upaya sistematis dan terencana. Richard Falk (Kymlicka, 2004: 183) menilai bahwa keragaman masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memperkaya pengalaman dan sumber daya budaya. Prinsip saling membutuhkan dan hubungan mutualis antara kelompok etnik akan melahirkan integrasi yang lebih baik di tengah keragaman.

### **Pancasila dalam Perspektif Multikulturalisme: Menjaga Kesatuan dan Keragaman**

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memiliki lima sila yang masing-masing menyampaikan nilai-nilai fundamental: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dirancang untuk mencerminkan dan mendukung kesatuan bangsa yang multikultural, menyediakan kerangka kerja untuk menghormati perbedaan sambil memperkuat persatuan.

Dalam masyarakat multikultural Indonesia, penerapan Pancasila dapat dilihat dalam berbagai kebijakan dan praktik. Misalnya, sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman budaya dan etnis. Kebijakan pendidikan yang berbasis pada Pancasila berupaya menanamkan rasa kebersamaan dan saling menghargai di antara pelajar dari berbagai latar belakang. Selain itu, program-program pemerintah dan lembaga masyarakat yang mengedepankan dialog antarbudaya dan upaya integrasi sosial sering kali mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Meskipun Pancasila berfungsi sebagai landasan untuk menjaga kesatuan dan keragaman, tantangan tetap ada. Perbedaan interpretasi nilai-nilai Pancasila dan konflik antara kelompok etnis atau agama dapat menjadi kendala dalam implementasinya. Misalnya, isu-isu seperti

intoleransi, ketidakadilan sosial, dan polarisasi politik dapat mengancam persatuan. Penting untuk menilai bagaimana nilai-nilai Pancasila diadaptasi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan bagaimana strategi dapat diperkuat untuk mempromosikan inklusi.

Studi kasus dari daerah dengan tingkat keberagaman yang tinggi, seperti Papua atau Sulawesi Selatan, menunjukkan bagaimana Pancasila diterapkan dalam praktik lokal untuk memfasilitasi hubungan antar kelompok. Misalnya, inisiatif lokal yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila sering kali berhasil dalam mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan kerjasama lintas budaya. Contoh lain termasuk program pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum untuk membentuk sikap toleransi dan solidaritas di kalangan pelajar.

Untuk memperkuat penerapan Pancasila dalam konteks multikulturalisme, disarankan agar pemerintah dan masyarakat terus meningkatkan upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan multikulturalisme. Program-program edukasi yang melibatkan pelatihan tentang toleransi, dialog antarbudaya, dan penyelesaian konflik harus diprioritaskan. Selain itu, kebijakan publik harus mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dalam upaya mempromosikan keadilan sosial dan memfasilitasi integrasi sosial yang harmonis.

## **KESIMPULAN**

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, memainkan peran krusial dalam memelihara kesatuan dan keragaman di tengah masyarakat yang multikultural. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga tentang Persatuan Indonesia, memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengelola keberagaman budaya dan etnis yang ada di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan sosial dan pendidikan terbukti efektif dalam membangun harmoni dan saling menghargai antar kelompok yang berbeda. Namun, tantangan dalam penerapan Pancasila tetap ada, termasuk perbedaan interpretasi, intoleransi, dan ketidakadilan sosial. Penting untuk terus memperkuat dan menyesuaikan strategi implementasi agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang. Program-program edukasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan upaya-upaya untuk mempromosikan dialog antarbudaya dapat membantu mengatasi tantangan tersebut.



Secara keseluruhan, Pancasila tetap menjadi alat yang efektif dalam menjaga kesatuan dan keragaman di Indonesia, asalkan diimplementasikan secara konsisten dan adaptif terhadap konteks sosial yang terus berubah. Memperkuat pendidikan tentang Pancasila dan prinsip-prinsip multikulturalisme serta menegakkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial adalah kunci untuk memastikan keberhasilan penerapan ideologi ini dalam masyarakat yang semakin kompleks.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahar, Saafroedin. (1997). Elit dan Etnik serta Negara Nasional. *Jurnal Prisma*, (4) Tahun XXVI, April-Mei 1997.
- Budiman, Hikmat (ed). (2005). *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation
- Budimansyah, Dasim. (2016). *Teori Sosial dan Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah Dasim dan Suryadi Karim.(2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
- Faisal, Sanafiah. (1992). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hanifi, Muhammad Luthfan. (2016). Ritual Perang dalam Kebudayaan Suku Dayak. *Jurnal Sabda*, 11(2), Desember 2016, hlm. 83-87.
- Kumala, A., & Tresnawaty, Y. (2019). Keluarga sakinah dan konstruksi alat ukurnya. *Jurnal ilmiah penelitian psikologi*, 5(1), 33-44.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Kymlica (2004). *Kewargaan Multikultural*. Jakarta:LP3ES.
- Mujenni, M., & Idris, H. (2024). Kafa'ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 1963-1975.
- Risladiba, R., & Sundawa, D. (2018, November). Implementation of Pancasila Values in Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu Community to Make Good and Smart Citizens. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 402-405). Atlantis Press.
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 4(1), 86-98.

- Shofa, A. M. I. A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai Pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 34-40.
- Suseno, Franz Magnis. (2005). *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta: Kompas.
- Ulya, N. H. (2017). Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 9(1).
- Wahidin, U. (2017). Peran strategis keluarga dalam pendidikan anak. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 1-9.